BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Praktek

Perkembangan ekonomi di era globalisasi seperti sekarang ini dimana tingkat kompetisi semakin tinggi, mendorong setiap perusahaan untuk mempersiapkan informasi yang tepat bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Zuliyanto, 2012). Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia (Ely Suhayati, dkk, 2009). Tujuan dari suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba (Ely Suhayati, dkk, 2009).

Perusahaan terbagi atas tiga jenis badan usaha, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan industri (Ely Suhayati, dkk, 2009). Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, maupun dalam prakteknya pemaksimuman keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan perusahaan **(**Sukirno, 2008). Ada perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai **(**Sukirno, 2008). Memang beberapa tujuan yang ditemui dalam praktek tersebut memberikan suatu alasan untuk meragukan kesesuaian daripada pemisalan keuntungan dalam menganalisi kegiatan perusahaan, tetapi di samping itu perlu diingat bahwa pada sebagian besar perusahaan tujuan memaksimumkan keuntungan merupakan tujuan paling penting **(**Sukirno, 2008).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan (Nurmantu, 2003). Semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut (Nurmantu, 2003). Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (*Public Revenues*), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, *royalti*, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak (Nurmantu, 2003).

Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003). Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meniputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 1). Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal 1 angka 27 merumuskan pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada Bendaharawan Pemerintah, Badan atau Instansi Pemerintah tersebut (Wiston M, 2009).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap Pertambahan Nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur (Rusdji, 2007). Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung (Mardiasmo, 2008). Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/ atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean dan/ atau impor Barang Kena Pajak (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1 angka 24).

Pajak Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 pasal 1 angka 25). Kesalahan pada penomoran kode dan nomor seri faktur pajak oleh *supplier* masih ditemui (Firman Slamet, 2013). Kesalahan ketika menentukan kode yang tidak sesuai dengan jenis

transaksinya yang dilakukan, dimana pemungut Badan Usaha Milik Negara dikatakan sebagai pemungut Bendaharawan Pemerintah (Firman Slamet, 2013). Masih ditemui *supplier* yang belum paham atas penentuan kode pada faktur pajak tersebut (Firman Slamet, 2013).

Dengan demikian penentuan kode dan nomor seri faktur pajak haruslah sesuai dengan peraturan yang telah di buat oleh Direktur Jenderal Pajak yakni pada Peraturan Diretur Jenderal Pajak Nomor PER-24/ PJ/ 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Oleh karena itu dalam laporan kuliah kerja praktek ini penulis mengambil judul **"IMPLEMENTASI KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK OLEH *SUPPLIER* PADA PT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kuliah Kerja Praktek

Maksud kuliah kerja praktek ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak, sehingga diketahui hasil dari perubahan peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak, apakah sudah dapat di pahami oleh pengusaha kena pajak yang menggunakan faktur pajak tersebut.

1.2.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Tujuan kuliah kerja praktek di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah untuk mengetahui :

1. Implementasi Kodefikasi Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Implementasi Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil kuliah kerja praktek ini merupakan sekumpulan informasi mengenai efektivitas penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak yang diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap permasalah diatas, antara lain :

1. Bagi Penulis

   Membuat penulis menjadi bisa membuat faktur pajak yang benar dengan memperhatikan penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, penulis pun menjadi bisa mengimplementasikan fungsi dari setiap jenis kode yang berbeda pada faktur pajak.

2. Bagi Perusahaan

   Dengan adanya kuliah kerja praktek yang dilakukan penulis membuat pekerjaan pada departemen pajak dan asuransi menjadi terbantu. Dimana penulis membantu pekerjaan diantaranya memisahkan dokumen-dokumen

pada masing-masing jenis ataupun mengurutkannya berdasarkan urutan tanggal, dan bulan dokumen tersebut dibuat. Penulispun melakukan verifikasi dokumen pajak pada sistem yang sudah terkomputerisasi di perusahaan.

3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi, informasi dan pengetahuan mengenai penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak yang dapat berguna bagi Fakultas Ekonomi pada Program Studi Akuntansi khususnya pada mata kuliah yang mempelajari mengenai faktur pajak tersebut, diantaranya mata kuliah perpajakan dan sistem informasi akuntansi. Serta untuk Fakultas Teknik dimana dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan program aplikasi baru yang dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang perlu membuat faktur pajak secara lebih mudah.

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Dalam menyusun dan menyelesaikan laporan kuliah kerja praktek ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari laporan-laporan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan penulis bahas dengan terjun langsung dalam pembuatan laporan yang akan diteliti serta mengumpulkan data dan informasi sebagai materi pendukung yang penulis butuhkan dari perusahaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang dilakukan dengan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek dalam pengambilan data primer.

Data primer didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mencari dan memperoleh data dari Departemen Pajak dan Asuransi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dimana penulis melaksanakan kuliah kerja praktek dengan cara :
   a) Pengamatan, yaitu dengan mengamati secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas, pengamatan dilakukan di Departemen Pajak dan Asuransi pada bagian verifikasi pajak.
   b) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mempunyai kaitan dengan objek laporan kuliah kerja praktek, wawancara penulis lakukan dengan narasumbernya adalah *supervisior* seksi verifikasi pajak dan karyawan pada seksi perencanaan dan pelaporan pajak.
   c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung pembuatan laporan kuliah kerja praktek yang penulis susun, dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah Faktur Pajak dengan kode 010, Faktur Pajak dengan kode 020, Faktur Pajak dengan kode 030, Faktur Pajak dengan kode 040, Faktur Pajak dengan kode 070, Faktur Pajak dengan kode 080, BC 4.0, dan Surat Setoran Pajak.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu untuk memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan laporan

kuliah kerja praktek, juga dengan pencarian data yang dilakukan secara *online* melalui situs-situs yang berhubungan dengan laporan kuliah kerja praktek.

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kuliah Kerja Praktek

Lokasi Kuliah Kerja Praktek ini bertempat di PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang terletak di Jl. Pajajaran 154 Bandung 40174, Indonesia PO BOX 1714 BD, Phone (022) 6040606, 6031717, Fax (022) 6033912. Penulis ditempatkan pada Departemen Pajak dan Asuransi.

1.5.2 Waktu Kuliah Kerja Praktek

Kuliah kerja praktek yang penulis laksanakan selama satu periode penuh dimulai pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan 20 September 2013. Hari kerja perusahan yang berlaku untuk karyawan maupun yang melaksanakan kuliah kerja praktek adalah Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja di mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Waktu kuliah kerja praktek terdapat pada halaman berikut :

Tabel 1.1

Waktu Kuliah Kerja Praktek

NO	PROSEDUR	BULAN						
		Juni 2013	Juli 2013	Agust 2013	Sept 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013
Tahap Persiapan								
1.	Meminta Surat Pengantar KKP	■						
2.	Menentukan Tempat KKP		■	■				
3.	Mendapatkan Tempat KKP			■				
Tahap Pelaksanaan								
1.	Melaksanakan KKP			■	■			
2.	Penetuan pembimbing KKP pada perusahaan			■				
3.	Penyusunan Laporan KKP dengan pembimbing perusahaan				■	■	■	■
4.	Penilaian KKP oleh pembimbing perusahaan							■
Tahap Pelaporan								
1.	Penentuan Dosen Pembimbing KKP				■			
2.	Penyusunan laporan KKP dengan dosen pembimbing				■	■	■	■
3.	Sidang laporan KKP dengan dosen pembimbing							■
4.	Penilaian laporan KKP oleh dosen pembimbing							■